



Kebijakan Luar Negeri Turki: Kesepakatan Turki kepada Rusia dalam Mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia Pasca Konflik Nagorno-Karabakh

Falentinoris Yubilio Wiku, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Nagorno-Karabakh conflict, which has become a legacy of the Soviet Union, broke out again on September 27, 2020. This conflict involved Armenia and Azerbaijan, and attracted the attention of international actors, such as Turkey and Russia. The Nagorno-Karabakh conflict lasted for more than six weeks which culminated in a ceasefire agreement signed by Armenia, Azerbaijan and Russia on November 9, 2020. In order to oversee the implementation of this ceasefire agreement, Turkey signed an agreement with Russia to establish a Joint Turkey-Russia Center in November 10, 2020. The purpose of this study is to reveal why Turkey made an agreement with Russia to establish a Joint Turkey-Russia Center in Azerbaijan after the Nagorno-Karabakh conflict (2020). The method used in this research is an explanatory-qualitative approach. This study uses Walter Carlsnaes' Foreign Policy Theory as a theoretical framework. The findings of this study reveal that Turkey made an agreement with Russia in establishing the Turkey-Russia Joint Center because of Turkey's dependence on Russia and the ineffectiveness of co-chairs OSCE Minsk Group, as well as the influence of Turkey's foreign policy doctrine which then prompted Turkish President Recep Tayyip Erdoğan to take strategic role with Russia as well as intermediary for the peace process for Azerbaijan after the Nagorno-Karabakh conflict.

Keywords: *Nagorno-Karabakh Conflict, Foreign Policy, Turkey, President Recep Tayyip Erdoğan*

PENDAHULUAN

Pada 27 September 2020, konflik Nagorno-Karabakh kembali pecah. Aktor utama yang terlibat di dalam konflik ini adalah Armenia dan Azerbaijan. Konflik Nagorno-Karabakh bisa pecah karena pihak Armenia menuduh bahwa pihak Azerbaijan melakukan serangan di Kota Vardenis, Armenia, sebaliknya Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengklaim bahwa pihak Armenia yang lebih dulu melakukan penyerangan di Kota Dashkasan, Azerbaijan (Lisbet, 2020:7). Imbas dari saling tuduh-menuduh ini Armenia dan Azerbaijan melakukan pertempuran di wilayah Nagorno-Karabakh. Adanya konflik ini

mengundang perhatian para aktor internasional. Aktor internasional yang intensif terlibat di dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah Turki dan Rusia. Secara spesifik, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan secara terbuka mendukung operasi militer Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh pada 27 September 2020 (Independent, 2020). Sementara itu, di dalam konflik ini Rusia memainkan perannya sebagai pihak mediator ketika Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov melakukan mediasi bersama Armenia dan Azerbaijan pada 10 Oktober 2020 (DW, 2020). Namun, mediasi tersebut gagal karena Azerbaijan menyerang kembali kota Stepanakert di wilayah Nagorno-Karabakh (DW, 2020). Dengan demikian, konflik Nagorno-Karabakh bisa berakhir ketika adanya proses perdamaian.

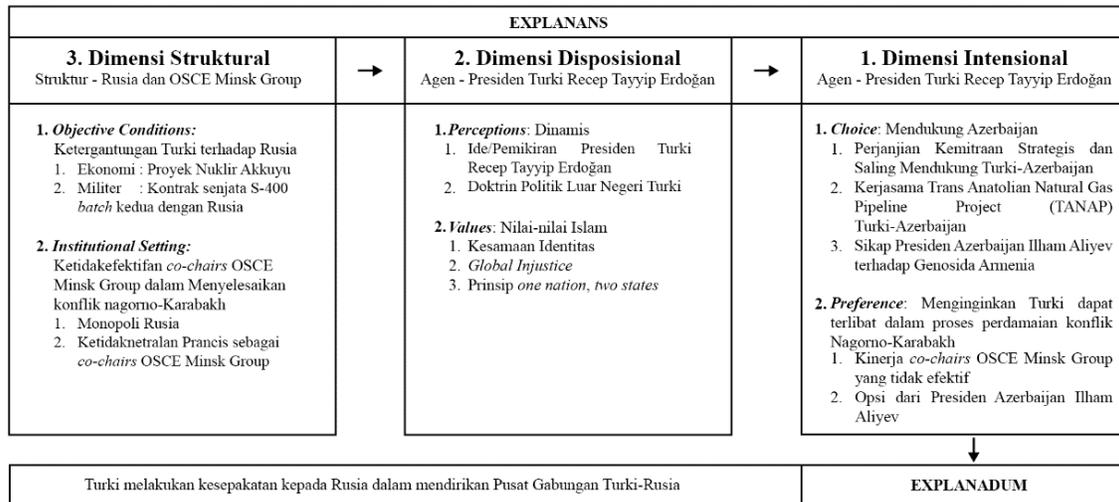
Turki dan Rusia memainkan peran atas proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh. Dalam hal ini, Rusia berhasil mengakhiri konflik ini dengan ditandatanganinya perjanjian gencatan oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020 (President of Russia, 2020). Kemudian, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan juga melakukan kesepakatan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pada 10 November 2020 (Presidency of The Republic of Türkiye, 2020b). Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) terkait pembentukan pusat tersebut oleh Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada 11 November 2020 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020). Pusat Gabungan Turki-Rusia diresmikan oleh Menteri Pertahanan Azerbaijan Zakir Hasanov, Wakil Menteri Pertahanan Turki Yunus Emre Karaosmanoğlu, dan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin pada 30 Januari 2021 (Republic of Türkiye Ministry of National Defence, 2020). Manajemen pengawasan dari pusat ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdullah Katirci dari pihak Turki dan dari pihak Rusia dipimpin oleh Mayor Jenderal Viktor Fedorenko (Rác, 2021). Masing-masing militer Turki dan Rusia yang bekerja di ini menggunakan pesawat tanpa awak (*drone*). Urgensi dari Pusat Gabungan Turki-Rusia ialah untuk mengawasi perjanjian gencatan 9 November 2020 Penting untuk digarisbawahi bahwa Turki secara perdana terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh bersama Rusia di Pusat Gabungan Turki-Rusia.

Keterlibatan Turki bersama Rusia dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh menarik untuk diteliti. Penelitian ini akan memenuhi penelitian terdahulu dari beberapa kajian pustaka yang akan disajikan. Dimulai dari penelitian Bayram Balci dengan judul “Strengths and Constraints of Turkish Policy in the South Caucasus” (2014) yang memaparkan bahwa Turki mulai menaruh perhatiannya terhadap wilayah Armenia, Azerbaijan, dan Georgia pasca bubarnya Uni Soviet akibat adanya kekayaan energi di ketiga negara tersebut (Balci, 2014). Berikutnya, ada penelitian yang berjudul “The Discourse One Nation Two States: The Position of Turkey in The Nagorno-Karabakh Conflict” (2015) yang ditulis oleh Shamkal Abilov dengan penjelasan bahwa Turki memiliki kebijakan luar negeri yang kooperatif guna mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh (Abilov, 2015). Terakhir, ada penelitian yang berjudul “Turkey’s Approach to The Nagorno-Karabakh Crisis (2003-2020)” (2020) karya Zeynab Vatankah yang menjelaskan pendekatan Turki terhadap krisis Nagorno-Karabakh di bawah pemerintahan Partai AKP (*Adalet ve Kalkynma Partisi*) sejak tahun 2003-2020 (Vatankah, 2021). Oleh karena itu, terdapat kekosongan penelitian dari beberapa kajian pustaka tersebut.

Adanya kekosongan penelitian dari kajian pustaka terdahulu mendorong penelitian ini dilakukan. Penelitian ini berusaha menawarkan *novelty* (kebaruan) berupa *State of the Art* yang terletak pada aspek agen dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dan aspek struktur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Turki khususnya kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh. Merujuk pada penelitian terdahulu ditemukan belum ada yang membahas hal tersebut. Lebih lanjut, metode penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Selain itu, sumber data di dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil kegiatan wawancara bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D selaku Dosen Sekolah Kajian Strategik dan Global-Universitas Indonesia. Sebaliknya, data sekunder akan diperoleh dari studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri Walter Carlsnaes guna menemukan alasan Turki melakukan kesepakatan kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia. Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa tindakan kebijakan luar negeri pada aspek agen dan struktur tidak dapat dikecualikan atau memberikan hak istimewa pada aspek tertentu (Carlsnaes, 1992:246). Dengan kata lain, aspek agen dan struktur bersifat *positive sum-game*, yaitu aspek agen dan struktur saling berkaitan satu sama lain secara dinamis. Di dalam teori ini ada “a logically tripartite approach” yang terdiri dari dimensi intensional (*choice* dan *preference*), dimensi disposisional (*perceptions* dan *values*), dan dimensi struktural (*objective conditions* dan *institutional setting*) (Carlsnaes, 1992:254). Secara spesifik, dimensi intensional dipandang sebagai dasar dari maksud dan tujuan agen mengambil tindakan kebijakan luar negeri (Carlsnaes, 1992:254). Berikutnya, dimensi disposisional erat kaitannya dengan pendekatan kognitif dan psikologis dari agen (Carlsnaes, 2016:126). Di dalam dimensi ini, mekanisme *perceptions* dilihat sebagai pandangan agen terhadap dunia, sebaliknya mekanisme *values* dipandang sebagai sistem kepercayaan yang dianut oleh agen (Carlsnaes, 2016:126). Selanjutnya, dimensi struktural bisa membatasi tindakan agen dan menawarkan peluang bagi agen karena mencakup aspek nasional, internasional, budaya, sosial, dan ekonomi, serta material (Carlsnaes, 2016:126). Penting untuk digarisbawahi bahwa ketiga dimensi ini merupakan variabel independen (*explanans*) yang pada akhirnya akan menghasilkan variabel dependen (*explanandum*).

PEMBAHASAN



Gambar 2. Teori Kebijakan Luar Negeri Walter Carlsnaes berupa “a logically tripartite approach” dalam Menganalisis Kesepakatan Turki kepada Rusia dalam Mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia Pasca Konflik Nagorno-Karabakh (Diolah oleh penulis)

Merujuk pada gambar 2, penjelasan terkait bagian *explanans* dari “a logically tripartite approach” di dalam teori kebijakan luar negeri Walter Carlsnaes dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dimensi Struktural (*Objective conditions* dan *Institutional Setting*)

Objective conditions dari dimensi ini berupa ketergantungan Turki terhadap Rusia. Ketergantungan ini mencakup aspek ekonomi dan militer. Pertama, dalam aspek ekonomi, Turki dan Rusia sedang terlibat dalam proyek pembangunan Nuklir Akkuyu ketika konflik Nagorno-Karabakh berlangsung. Dapat diketahui bahwa Pemerintah Turki dan Rusia melakukan kerja sama dalam proyek pembangunan Nuklir Akkuyu pada 12 Mei 2010 (Akkuyu Nuclear Rosatom, 2020). Proyek ini dinilai memberikan keuntungan bagi Turki, seperti keseluruhan biaya dari proyek pembangunan perusahaan Nuklir Akkuyu dibebankan kepada Rusia dan Rusia juga mendidik pelajar dari Turki secara gratis untuk bekerja di perusahaan ini, serta hasil limbah dari reaktor Nuklir Akkuyu akan diolah oleh Rusia (Azhar, 2018:78-79). Kedua, dalam aspek militer, Turki sedang terlibat dalam kontrak pengiriman senjata S-400 *batch* kedua dengan Rusia. Kontrak ini ditandatangani oleh Turki dan Rusia pada Agustus 2020 (TASS, 2020). Sebelumnya, Turki telah membeli senjata S-400 *batch* pertama dengan Rusia, tetapi Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari program pengiriman pesawat F-35 (KM, 2020:65). Ketiadaan suplai alat militer dari Amerika Serikat mendorong Turki mempertahankan suplai alat militernya dari Rusia. Adanya aspek ekonomi dan militer ini mendorong Turki berusaha untuk tidak bertikai dengan Rusia dalam konflik Nagorno-Karabakh guna proyek pembangunan Nuklir Akkuyu dan

pengiriman senjata S-400 *batch* kedua dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Turki berusaha menjaga hubungannya dengan Rusia di dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Tidak hanya itu, dimensi disposisional juga berkaitan dengan *institutional setting*, yaitu ketidakefektifan *co-chairs* OSCE Minsk Group dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. OSCE Minsk Group merupakan institusi yang memiliki tugas untuk memberikan solusi perdamaian bagi Armenia dan Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Mandat untuk menjalankan tugas ini diberikan kepada anggota *co-chairs* OSCE Minsk Group yang diduduki oleh Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia. Namun, *co-chairs* OSCE Minsk Group tidak efektif dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh karena Rusia berhasil melakukan monopoli dalam penyelesaian konflik ini pada 9 November 2020 tanpa melibatkan Amerika Serikat dan Prancis. Rusia berhasil melakukan monopoli ini karena Amerika Serikat dibawah pemerintahan Barack Obama hingga Donald Trump mengizinkan Rusia menggantikan peran dari *co-chairs* OSCE Minsk Group (Socor, 2020b). Ditambah lagi, birokrasi Rusia pada *co-chairs* OSCE Minsk Group juga sudah pada tingkat Menteri Luar Negeri dan Presiden, yang justru berbanding terbalik dengan birokrasi Amerika Serikat dan Prancis yang masih pada tingkat Menteri Luar Negeri (Socor, 2020a). Penyebab ketidakefektifan lainnya, yaitu ketidaknetralan Prancis sebagai *co-chairs* OSCE Minsk Group. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dukungannya kepada Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh pada 30 September 2020 (Anadolu Agency, 2020a). Adanya ketidaknetralan ini mengakibatkan Azerbaijan tidak percaya terhadap institusi OSCE Minsk Group. Dengan demikian, *co-chairs* OSCE Minsk Group tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.

Dimensi Disposisional (*Perceptions* dan *Values*)

Dimensi Disposisional berkaitan dengan *perceptions* dan *values* dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Pertama, terkait *perceptions*, berdasarkan hasil wawancara penelitian Skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D menyatakan bahwa:

“...Bagi dia, dunia internasional memang sesuatu yang dinamis. Dia sebagai presiden memang terikat pada doktrin-doktrin politik luar negeri Turki. Doktrin politik luar negeri Turki, yaitu *yurtta sulh, cihanda sulh – peace at home, peace abroad* – damai di Turki, damai di dunia. Jadi, itu prinsip politik luar negerinya, dia terikat dengan itu. Tetapi, dalam operasionalnya, tentu saja presiden punya inisiatifnya sendiri. Dalam hal ini, Turki melihat dunia itu dinamis, maka Turki harus bisa beradaptasi...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, *perceptions* Presiden Erdoğan dalam melihat dunia internasional adalah dinamis. Untuk menanggapi situasi dunia internasional yang dinamis ini Presiden Erdoğan menerapkan doktrin politik luar negeri Turki dan inisiatifnya sendiri. Secara sederhana, doktrin politik luar negeri Turki berupa *peace at home, peace in the world* ini menuntun Turki untuk menciptakan situasi yang damai, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Disisi lain, inisiatif dari Presiden Erdoğan juga turut andil dalam menanggapi situasi internasional yang dinamis. Oleh karena itu, Turki dibawah pemerintahan Presiden Erdoğan memiliki pegangan berupa doktrin politik luar negeri Turki dan ide/pemikirannya sendiri dalam merumuskan kebijakan luar negeri Turki.

Perkembangan situasi dunia internasional yang dinamis dapat dilihat dari konflik Nagorno-Karabakh. Pecahnya konflik Nagorno-Karabakh pada 27 September 2020 mendorong Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan untuk menanggapi konflik ini dengan menuangkan ide dan menerapkan doktrin politik luar negeri Turki. Menurut hasil wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D menyatakan bahwa:

“...Relasi Turki dan Azerbaijan dari dulu terus di *maintain*, makanya Erdoğan sering berkunjung ke Azerbaijan dan Presiden Aliyev juga sering berkunjung ke Turki. Jadi, relasi mereka itu sudah sangat dekat...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, adanya kedekatan hubungan antara Turki dan Azerbaijan mempengaruhi ide/pemikiran dari Presiden Erdoğan. Ide/pemikiran yang dituangkan oleh Presiden Erdoğan dalam menanggapi konflik Nagorno-Karabakh adalah mendukung Azerbaijan secara politik. Dukungan ini dapat dilihat sebagai bentuk bahwa Presiden Erdoğan ingin memelihara hubungannya dengan Azerbaijan dalam segala situasi apapun khususnya dalam konflik Nagorno-Karabakh. Dengan demikian, ide yang dituangkan Presiden Erdoğan dalam mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh merupakan hasil kalkulasi dari kedekatan hubungan antara Turki dan Azerbaijan.

Berikutnya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan juga menerapkan doktrin politik luar negeri Turki dalam merespon konflik Nagorno-Karabakh. Presiden Erdoğan yang terikat dengan doktrin politik luar negeri Turki (*peace at home, peace in the world*) harus mampu menciptakan situasi yang damai dalam konflik Nagorno-Karabakh. Hal ini kemudian menumbuhkan keinginan Presiden Erdoğan untuk membawa Turki bisa terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh bersama Rusia (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020c). Adanya doktrin politik luar negeri Turki memandu Presiden Erdoğan untuk menghasilkan kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan keterlibatan Turki dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh. Singkat kata, implikasi dari doktrin politik luar negeri Turki mendorong Presiden Erdoğan untuk menghasilkan rencana atau strategi dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh.

Kedua, *values* yang dianut oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan adalah nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang dianut oleh Presiden Erdoğan terbentuk selama perjalanan hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D menyatakan bahwa:

“...Jadi, memang kalau kita lihat *background*-nya, karakternya itu terbentuk memang sejak dia masih SMP, dia sudah sekolah di Imam Hatip Okul. Jadi, Imam Hatip Okul itu kalau di Indonesia mirip pesantren. Jadi, mereka yang lulus dari Imam Hatip itu biasanya akan menjadi Imam atau Khatib di Masjid. Jadi, kalau misalkan dia tetap dengan jalur karir Imam Hatip, *ending*-nya akan menjadi Imam Masjid atau Khatib di Masjid. Tetapi, dia setelah lulus dari Imam Hatip, dia memilih lanjut ke SMA. Setelah itu, dia aktif berorganisasi. Jadi, pertama, dari sisi *backgorund* pendidikan, pendidikan agamanya kuat. Kemudian, selanjutnya dia bergabung dengan Millî Görüş. Millî Görüş itu organisasi yang didirikan Nercmetin Erbakan. Nercmetin Erbakan merupakan sosok yang dianggap sebagai ideolog/politisi yang pikirannya itu terinspirasi dari nilai-nilai Islam...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, nilai-nilai Islam mulai tumbuh saat Erdoğan sekolah di Imam Hatip dan Millî Görüş. Nilai-nilai Keislaman Erdoğan semakin kuat karena sosok Erbakan di Millî Görüş. Penting untuk digarisbawahi bahwa perjalanan bersama Erbakan ini membentuk karakter Presiden Erdoğan sebagai politisi yang mengadopsi nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh Presiden Erdoğan juga berpengaruh dalam menanggapi konflik Nagorno-Karabakh. Nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh Presiden Erdoğan adalah kesamaan identitas dan *global injustice*. Menurut hasil wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D menyatakan bahwa:

“...Kemudian, dalam setiap kebijakannya Erdoğan memang selalu mempertimbangkan aspek yang sifatnya ideologis dan pragmatis. Pertama dari sisi ideologis, kebijakan-kebijakan dari Erdoğan sering menggunakan narasi kesamaan identitas. Dalam hal ini, ketika Erdoğan membela Palestina dikarenakan Palestina saudara kita. Kemudian, ketika terjadi peristiwa di Myanmar, yaitu orang rohingya di persekusi, Erdoğan juga menyampaikan narasi yang sama bahwa ada penyiksaan dan persekusi oleh etnis Myanmar terhadap Rohingya (Muslim). Selanjutnya, ditengah-tengah ini Erdoğan juga menyuarakan *global injustice*. *Global injustice* dapat dilihat sebagai bentuk untuk membela *value* bahwa masih banyak yang mendapatkan *injustice*. Oleh karena itu, Erdoğan melihat bahwa orang-orang yang terdampak dari ketidakadilan harus kita bela. Narasi-narasi ini disuarakan dalam aspek internasional...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, Presiden Erdoğan juga menggunakan aspek kesamaan identitas dan *global injustice* dalam merespon konflik Nagorno-Karabakh. Terkait kesamaan identitas, Turki dan Azerbaijan adalah negara yang mayoritasnya umat Muslim (Ismayilov & Graham, 2016:137-138). Adanya kesamaan identitas agama ini mendorong Presiden Erdoğan untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Berikutnya, terkait *global injustice*, Presiden Erdoğan memilih untuk mendukung Azerbaijan karena etnis separatis Armenia telah lama menduduki tujuh wilayah kedaulatan Azerbaijan (Ağdam, Fuzuli, Gubadli, Jabrail, Kalbajar, Lachin, dan Zangilan) di wilayah Nagorno-Karabakh sejak 1993. (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020e). Menanggapi hal tersebut, Presiden Erdoğan memutuskan untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh agar Azerbaijan mendapatkan keadilan atas tujuh distrik yang dikuasai oleh etnis separatis Armenia. Oleh karena itu, dukungan Presiden Erdoğan terhadap Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh dapat dilihat sebagai bentuk bahwa Turki peduli terhadap negara-negara Muslim yang tidak mendapatkan keadilan dalam sebuah konflik.

Dukungan Presiden Erdoğan terhadap Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh juga didukung oleh prinsip *one nation, two states*. Berdasarkan hasil wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D menyatakan bahwa:

“...bagi Turki ada istilah *tek millet, iki devlet*, yang artinya satu bangsa dua negara. Jadi, orang Turki menganggap Azerbaijan itu satu irisan...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, istilah *tek millet, iki devlet* sama dengan prinsip *one nation, two states* yang memiliki arti bahwa Turki dan Azerbaijan memiliki kesamaan

identitas akan agama dan budaya. Secara agama, mayoritas orang Turki dan Azerbaijan adalah Muslim, sedangkan secara budaya, Turki dan Azerbaijan menganut rumpun etnis yang sama, yaitu Bangsa Turk. Prinsip *one nation, two states* menjadi prinsip fundamental bagi hubungan Turki dan Azerbaijan. Terkait konflik Nagorno-Karabakh, adanya prinsip ini mendorong Presiden Erdoğan untuk memberi dukungan secara politik ke Azerbaijan. Konflik Nagorno-Karabakh menjadi momentum bagi Presiden Erdoğan untuk memposisikan dirinya bersama Azerbaijan. Dengan demikian, Presiden Erdoğan mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh sebagai bentuk implementasi dari prinsip *one nation, two states*.

Dimensi Intensional (*Choice* dan *Preference*)

Dimensi intensional berkaitan dengan aspek *choice* dan *preference* dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan. Pertama, *choice* dari Presiden Erdoğan dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah mendukung Azerbaijan dalam konflik tersebut yang dinyatakan pada 27 September 2020 (Independent, 2020). Adanya dukungan ini dapat dilihat sebagai bentuk implementasi dari Perjanjian Kemitraan Strategis dan Saling Mendukung Turki-Azerbaijan. Perjanjian ini mengafirmasi bahwa Turki dan Azerbaijan harus saling mendukung satu sama lain apabila salah satu negara mendapatkan serangan militer atau agresi dari pihak ketiga (Satanakis & Süss, 2021). Azerbaijan yang mendapatkan serangan militer dari Armenia mendorong Presiden Erdoğan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan perjanjian ini. Oleh karena itu, Presiden Erdoğan memberikan dukungan kepada Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *choice* dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan untuk mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh adalah faktor ekonomi. Turki mendapatkan keuntungan dari kerja sama penyaluran gas alam dari Azerbaijan melalui Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP). Dapat diketahui bahwa konsumsi Turki terhadap gas alam sebesar 97% (Ibrahimov, 2015:88). Besarnya presentase konsumsi Turki terhadap gas alam mendorong Presiden Erdoğan untuk mengamankan pasokan gas alam dari Azerbaijan dengan cara mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Konflik ini menjadi momentum bagi Presiden Erdoğan untuk membalas keuntungan dari Azerbaijan dalam kerja sama TANAP. Disisi lain, Turki memang memiliki diversifikasi pasokan gas alam dari Rusia melalui pipa TurkStream (Anadolu Agency, 2020b). Namun, ketersediaan gas alam Turki tetap akan kurang apabila Azerbaijan menghentikan pasokan gas alam ke Turki. Singkat kata, Presiden Erdoğan tidak ingin kerja sama dengan Azerbaijan melalui TANAP ditangguhkan dalam situasi konflik Nagorno-Karabakh.

Adapun sikap dari Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev yang mempengaruhi *choice* Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan dalam konflik Nagorno-Karabakh. Presiden Aliyev memiliki sikap terhadap isu genosida Armenia yang mencoreng nama baik Turki di kancah internasional. Isu genosida Armenia merupakan peristiwa pembunuhan massal terhadap 1,5 juta etnis Armenia yang terjadi di bawah Kekaisaran Ottoman pada tahun 1915 (Widigo, 2015:2). Hasil wawancara penelitian skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D menyatakan bahwa:

“...Armenia selalu aktif melakukan kampanye yang menganggap bahwa Ottoman Turki Utsmani dimasa lalu melakukan genosida. Bagi Turki,

tuduhan ini adalah hal yang serius, sehingga bagi Turki, Armenia akan tetap dianggap sebagai salah satu negara yang masuk dalam daftar *blacklist* sebagai negara yang tidak kooperatif dengan Turki...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, Armenia selalu menuntut Turki untuk mengakui tindakan genosida Armenia. Tuntutan ini selalu dilayangkan oleh Armenia, tetapi Pemerintah Turki hingga saat ini tidak mengakui tindakan genosida tersebut (Nichol, 2012:13). Sebaliknya, Azerbaijan selama di bawah pemerintahan Ilham Aliyev mendukung Turki dan menolak adanya genosida Armenia yang dilakukan oleh Turki pada masa Kesultanan Ottoman (Genocide Watch, 2020). Hal ini kemudian mendorong Presiden Erdoğan untuk mendukung Presiden Aliyev dalam isu konflik Nagorno-Karabakh. Adanya isu genosida Armenia dan konflik Nagorno-Karabakh mendorong Presiden Erdoğan dan Presiden Aliyev saling mendukung satu sama lain. Penting untuk digarsibawahi bahwa sikap Presiden Aliyev yang tidak mengakui isu genosida Armenia mampu mempengaruhi *choice* dari Presiden Erdoğan dalam konflik Nagorno-Karabakh.

Kedua, *preference* dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan adalah menginginkan Turki dapat terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh. Keinginan ini dipengaruhi oleh faktor kinerja *co-chairs* OSCE Minsk Group yang tidak efektif dalam penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh. Presiden Erdoğan menilai bahwa *co-chairs* OSCE Minsk Group tidak memiliki kinerja yang baik dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh yang pecah pada 27 September 2020 Presiden Erdoğan secara terang-terangan menilai ketidakefektifan kinerja *co-chairs* OSCE Minsk Group dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh di dalam acara “Simposium Hukum Maritim Internasional dan Mediterania Timur dalam Sejarah, Politik, dan Hubungan Internasional (28 September 2020)” (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020a) dan acara “Forum Ekonomi dan Bisnis Turki-Afrika (8 Oktober 2020)” (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020d). Ketidakefektifan *co-chairs* OSCE Minsk Group ini berdampak pada penguasaan tujuh distrik Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh oleh etnis separatis Armenia sejak 1993. Hal inilah yang membuat Presiden Erdoğan mempersoalkan kinerja *co-chairs* OSCE Minsk Group karena Azerbaijan yang merupakan sekutu dekat Turki tidak mendapatkan keadilan atas wilayah tersebut. Oleh karena itu, Presiden Erdoğan ingin Turki dapat terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh karena kinerja *co-chairs* OSCE Minsk Group tidak efektif dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Adapun faktor lainnya yang mendorong Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan ingin Turki bisa terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh, yaitu opsi dari Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev. Pada 5 Oktober 2020, Presiden Aliyev memberikan opsi agar Turki harus terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh tahun 2020 (President of the Republic of Azerbaijan, 2020). Alasan Presiden Aliyev memberikan opsi ini karena Presiden Erdoğan telah bersedia mendukung Azerbaijan sampai konflik Nagorno-Karabakh berakhir (President of the Republic of Azerbaijan, 2020). Selain itu, berdasarkan keterangan wawancara penelitian Skripsi bersama Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D bahwa:

“...Azerbaijan sangat mengandalkan Turki karena Turki adalah negara penting dikawasan di Eropa Timur dan sekitarnya. Turki itu negara yang disegani, sehingga bagi Azerbaijan menganggap hidup dan mati kita serahkan kepada Turki...”

Merujuk pada hasil wawancara tersebut, Azerbaijan memiliki kepercayaan kepada Turki, sehingga Turki memiliki kendali dalam mengelola hubungannya dengan Azerbaijan. Selain itu, opsi yang diajukan Presiden Aliyev dapat dilihat sebagai bentuk bahwa Azerbaijan mengandalkan Turki dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh. Adanya ketidakefektifan *co-chairs* OSCE Minsk Group dan opsi dari Presiden Aliyev memberi peluang kepada Presiden Erdoğan untuk mengambil bagian dalam proses tersebut. Kesempatan ini diambil oleh Presiden Erdoğan dengan menyatakan bahwa Turki akan terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh bersama Rusia (Presidency of The Republic of Turkiye, 2020c). Dengan demikian, melalui rencana keterlibatan ini Presiden Erdoğan ingin menunjukkan bahwa Turki tidak hanya mendukung Azerbaijan dalam konflik Nagorno-Karabakh, tetapi Turki itu juga bisa terlibat dalam proses perdamaian konflik Nagorno-Karabakh.

Hasil kalkulasi dari ketiga dimensi yang merupakan variabel independen (*explanans*) pada akhirnya menghasilkan variabel dependen (*explanandum*). Hal ini dapat dilihat dari kesepakatan Turki kepada Rusia dalam mendirikan Pusat Gabungan Turki-Rusia pada 10 dan 11 November 2020. Alhasil, Pusat Gabungan Turki-Rusia resmi beroperasi untuk mengawasi perjanjian gencatan senjata yang disepakati oleh Armenia, Azerbaijan, dan Rusia pada 9 November 2020.

KESIMPULAN

Determinan Turki melakukan kerja sama dengan Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia pasca konflik Nagorno-Karabakh dipengaruhi oleh dimensi intensional, disposisional, dan struktural. Pertama, kesimpulan dari dimensi intensional adalah Presiden Erdoğan ingin berpartisipasi dalam proses perdamaian bagi Azerbaijan dan Armenia. Kedua, kesimpulan dari dimensi disposisional ialah Presiden Erdoğan ingin menancapkan pengaruh bagi Azerbaijan sekaligus menjadi kekuatan regional di wilayah Kaukasus Selatan. Terakhir, kesimpulan dari dimensi struktural ialah Turki memiliki ketergantungan ekonomi dan militer kepada Rusia dan *co-chairs* OSCE Minsk Group yang tidak efektif dalam menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. Oleh karena itu, hasil temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa Turki melakukan kesepakatan kepada Rusia dalam membangun Pusat Gabungan Turki-Rusia karena adanya ketergantungan Turki terhadap Rusia dan ketidakefektifan *co-chairs* OSCE Minsk Group, serta pengaruh doktrin politik luar negeri Turki yang kemudian mendorong Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan mengambil peran strategis bersama Rusia guna menjadi perantara proses perdamaian bagi Azerbaijan pasca konflik Nagorno-Karabakh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya dan rasa terima kasih kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A.Md.Ak., S.H., M.H., Ph.D sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Marten Hanura, S.IP M.P.S sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis. Lebih dari itu, penulis dengan segala hormat juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Syaroni Rofii, S.H.I., M.A., Ph.D selaku narasumber yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara penelitian

Skripsi. Singkat kata, semoga segala tanggung jawab yang diberikan kepada Ibu Ika, Bapak Marten, dan Bapak Rofii dapat dimudahkan dan dilancarkan.

REFERENSI

- Abilov, S. (2015). The Discourse “One Nation Two State”: The Position of Turkey in The Nagorno-Karabakh Conflict. *Journal of Caspian Affairs*, 1(2), 29–58.
- Akkuyu Nuclear Rosatom. (2020). *Akkuyu NPP Construction Project*. Akkuyu Nuclear Rosatom. <http://www.akkuyu.com/index.php>
- Anadolu Agency. (2020a). *France sides with Armenia in conflict with Azerbaijan*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/europe/france-sides-with-armenia-in-conflict-with-azerbaijan/1990924>
- Anadolu Agency. (2020b). *Presiden Turki dan Rusia resmikan pipa gas TurkStream*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/dunia/presiden-turki-dan-rusia-resmikan-pipa-gas-turkstream-/1695586>
- Azhar, I. Y. (2018). *Alasan Turki Bekerjasama dengan Rusia dalam Membangun Reaktor Nuklir Akkuyu*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Balci, B. (2014). Strengths and Constraints of Turkish Policy in the South Caucasus. *Insight Turkey*, 16(27), 43–52.
- Carlsnaes, W. (1992). The Agency-Structure Problem in Foreign Policy Analysis. *International Studies Quarte*, 36(3), 245–270.
- Carlsnaes, W. (2016). Actors, structures, and foreign policy analysis. In S. Smith, A. Hadfield, & T. Dunne (Eds.), *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases* (3rd ed., pp. 113–124). Bell and Bain Ltd.
- DW. (2020). *Azerbaijan-Armenia cease-fire takes effect*. DW. <https://www.dw.com/en/azerbaijan-armenia-cease-fire-takes-effect/a-55224851>
- Genocide Watch. (2020). *Genocide Emergency Alert: Azerbaijan’s Invasion of Artsakh November 2020*. Genocide Watch. <https://www.genocidewatch.com/single-post/genocide-emergency-alert-on-the-war-in-artsakh-nagorno-karabakh>
- Ibrahimov, R. (2015). Turkish-Azerbaijani Energy Relations: Significant Leverage in the Implementation of the Foreign Policy Interests of Both Countries. *Insight Turkey*, 17(2), 2015.
- Independent. (2020). *Armenia-Azerbaijan: A local conflict with a frightening global reach*. Independent. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/armenia-azerbaijan-conflict-nagorn-karabakh-russia-turkey-iran-b675408.html>
- Ismayilov, M., & Graham, N. A. (2016). *Turkish-Azerbaijani Relations: One state-two nations*. Routledge.

- KM, R. G. Y. (2020). *Dampak Kerjasama Pembelian Sistem Rudal S-400 Turki-Rusia Terhadap AS Tahun 2017-2019*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Lisbet. (2020). The Armenia-Azerbaijan Conflict and International Communities Peace Efforts. *Info Singkat*, 12(19), 7–12.
- Nichol, J. (2012). *Armenia, Azerbaijan, and Georgia: Political Developments and Implications for U.S. Interests*.
- Presidency of The Republic of Turkiye. (2020a). *Equations in which Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus are not fairly included cannot yield a Pax Mediterranea*. Presidency of The Republic of Turkiye.
<https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/122196/-equations-in-which-turkey-and-the-turkish-republic-of-northern-cyprus-are-not-fairly-included-cannot-yield-a-pax-mediterranea->
- Presidency of The Republic of Turkiye. (2020b). *Phone Call with President Vladimir Putin of Russia*. Presidency of The Republic of Turkiye.
<https://www.tccb.gov.tr/en/speeches-statements/558/122748/phone-call-with-president-vladimir-putin-of-russia>
- Presidency of The Republic of Turkiye. (2020c). *“The ceasefire agreement signed in Libya is not a ceasefire at the highest level.”* Presidency of The Republic of Turkiye.
<https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/122462/-the-ceasefire-agreement-signed-in-libya-is-not-a-ceasefire-at-the-highest-level->
- Presidency of The Republic of Turkiye. (2020d). *We have built bridges from heart to heart between our nation and the Africans*. Presidency of The Republic of Turkiye.
<https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/122326/-we-have-built-bridges-from-heart-to-heart-between-our-nation-and-the-africans->
- Presidency of The Republic of Turkiye. (2020e). *“We primarily opt for a settlement of disputes regarding the sharing of political and economic potential in the Mediterranean on an equitable basis.”* Presidency of The Republic of Turkiye.
<https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/122223/-we-primarily-opt-for-a-settlement-of-disputes-regarding-the-sharing-of-political-and-economic-potential-in-the-mediterranean-on-an-equitable-basis->
- President of Russia. (2020). *Statement by the President of Russia*. President of Russia.
<http://en.kremlin.ru/events/president/news/64381>
- President of the Republic of Azerbaijan. (2020). *Ilham Aliyev was interviewed by TRT Haber TV channel*. President of the Republic of Azerbaijan.
<https://president.az/en/articles/view/41763>
- Rác, A. (2021). *In Russia’s Hands: Nagorno-Karabakh after the ceasefire agreement* (No. 8).
- Republic of Türkiye Ministry of National Defence. (2020). *Dağlık Karabağ’daki Ateşkese*

İlişkin Gerçekleşen Mutabakat Zaptı İmza Töreninden Görüntüler. Republic of Türkiye Ministry of National Defence. <https://www.msb.gov.tr/SlaytHaber/11112020-74373>

Satanakis, S. M., & Süss, K. (2021). *The Shift in Turkey's Foreign Policy.*

Socor, V. (2020a). The Minsk Group: Karabakh War's Diplomatic Casualty (Part Four). *The Jamestown Foundation*, 17(173).

Socor, V. (2020b). The Minsk Group: Karabakh War's Diplomatic Casualty (Part Three). *The Jamestown Foundation*, 17(172).

TASS. (2020). *Russia signs contract with Turkey on 2nd batch of S-400 air defense systems.* TASS. https://tass.com/defense/1192793?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com

Vatankhah, Z. (2021). Turkey's Approach to the Nagorno-Karabakh Crisis (2003-2020). *The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World*, 9(36), 19–39.

Widigo, A. (2015). *Pengaruh Azerbaijan terhadap Upaya Normalisasi Turki dengan Armenia.* Universitas Airlangga.